

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku Buku

- Andrian S, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I*, Mandar Maju : Bandung.
- Chaizi Nasucha, 1985, *Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah*, Megapoin : ____ .
- Emrizon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Gramedia Utama Pustaka : Jakarta .
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT Raja Grafindo Persada : . Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. sinar grafika : Jakarta.
- Setiawan, Yudhi ,2009, *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschaapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Sitorus, Oloan, 2006 *keterbatasan hukum konsolidasi tanah perkotaan sebagai instrument kebijakan pertanahan partisipatif dalam penataan ruang di Indonesia*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Rahmadi, takdir, 2010, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, :Jakarta.
- Yunita, Sari, 2010. *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sakodi Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Skripsi.

2. Undang Undang

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

3. Internet

- Mukhlisin, “DPRD minta Pemkot Solok Tutaskan Tanah Konsolidasi”SUMBAR .Antara News,[http://www.antarassumbar.com/berita/4101/dprd-minta-pemkot-solok-tutaskan-tanah konsolidasi.html](http://www.antarassumbar.com/berita/4101/dprd-minta-pemkot-solok-tutaskan-tanah-konsolidasi.html), diakses 17 April 2016, jam 8.39 WIB.

id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok diakses pada tanggal 16 November 2016, jam 17.49

WIB

4. Surat

Surat pernyataan penyerahan tanah ulayat suku nan balimo Solok tanggal 17 Desember 1971.
Surat pernyataan persetujuan penyerahan tanah ulayat suku nan balimo tanggal 24 Desember tahun 1971.

Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 31 Mei 1976.

Surat edaran larangan penggarapan baru/ penambahan garapan lama sekitar jalan tembok dan sekitar ampang kualo nomor Pem.1271/I/2.- tertanggal 7 Juli 1976.

Akta perjanjian pelepasan dan penerimaan hak atas tanah tertanggal 19 Oktober 1976 .

pernyataan pembatalan penyerahan tanah dan tanda tangan tertanggal 20 Januari 1979.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 410/319/BPN-98.

Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Madya Solok Nomor 410.74/BPN-98 tanggal 1 Januari 1998 tentang Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Konsolidasi Tanah.

Surat keputusan walikota madya kepala daerah tingkat II Solok Nomor : 188645/ 112/ SK/Wsl-1995 Tentang penetapan Lokasi Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah perkotaan Di Kota Madya Tingkat II Solok

Salinan surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Solok Nomor: 530.3-98/hp/bpn-1998 tentang pemberian hak pakai atas nama pemerintah tingkat II Kotamadya Solok dan Instansi Pemerintah lainnya di Kota Madya Solok.

Putusan menteri negara agraria / kepala badan pertanahan nasional nomor : 58-VI-1998 tentang penegasan tanah negara sebagai obyek konsolidasi.